



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Daerah
Kota Makassar
TAHUN 2022

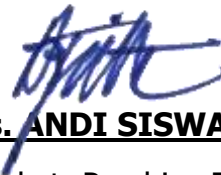
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini kamiawali dengan ungkapan Syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Makassar. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, dan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar tahun 2022 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Makassar, September 2021
KEPALA BADAN,



Drs. ANDI SISWANTA

Pangkat: Pembina Tk. I
Nip : 19621206 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	26
2.2.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	26
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	28
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	29
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEERANGKAT DAERAH	42
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	42
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021	22
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
TABEL 2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021	33
TABEL 3.1	KODEFIKASI, NOMENKLATUR SERTA RENCANA ANGGARAN BKPSDMD TAHUN 2021	51
TABEL 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dengan RKPD adalah Rencana Kerja BKPSDMD Kota Makassar harus mendukung dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Makassar Tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagai bagian terintegrasi dari Pemerintah daerah menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dalam sebuah Rencana Kerja, Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengemukakan bahwa Renja SKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan Kegiatan, sehingga kontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9), Tanggal 30 Desember 2019);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91);
21. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja BKPSDMD Kota Makassar Tahun 2022 merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat padanya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting diharapkan kepada Pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan perencanaan agar memberikan perhatian penting pada program-program yang telah disusun dan direncanakan oleh BKPSDMD Kota Makassar dan tentunya diikuti pula dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ini adalah

menyediakan tolak ukur pelaksanaan pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2022 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Makassar.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 kedalam rencana pembangunan tahunan;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 menyangkut strategi dan arah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, dan rumusan rencana program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra. Dari hasil evaluasi Rencana Kerja BKPSDMD Kota Makassar pada tahun 2021 bisa dikatakan sudah mencapai target kinerjanya, hal ini dapat dilihat dari indikator dan tolak ukur kinerja, rata-rata kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebesar 92,67 %. Total realisasi keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 83,39%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan maka capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan dari Anggaran Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2021. Hal ini berdampak positif terhadap tercapainya Renstra BKPSDMD Kota Makassar sesuai dengan yang diinginkan dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Makassar.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN;
 - 2.3 Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3.2 Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 - 3.3 Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program Kepegawaian Daerah

- 1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
 - 1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
 - 1.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 1.3 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
 - 2.1 Pengelolaan Mutasi ASN;
 - 2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat.
- 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
 - 3.1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN;
 - 3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN.
- 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
 - 4.3 Pembinaan disiplin ASN.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 - 1.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Pencapaian hasil terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2021 rata-rata adalah 92,67 %, dengan rincian capaian fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 83,39 %.

Berdasarkan pada capaian realisasi fisik dari 12 (dua belas) kegiatan selama tahun 2021, terdapat 2 Kegiatan yang belum mencapai target yaitu kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan yang telah mencapai realisasi fisik diatas 90 % sampai dengan 100 % adalah kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengembangan Kompetensi ASN

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja kegiatan BKPSDMD Kota Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Rencana target fisik (%)	Realisasi target fisik (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	31,6
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	93,91
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	86,92
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	59,29
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	56,46
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,52
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	52,92
2.	Program Kepegawaian daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	85,20
		Mutasi dan Promosi ASN	100	58,75
		Pengembangan Kompetensi ASN	100	100

		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	42,28
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100	76,48

Terdapa 3 (tiga) Program dengan capaian kinerja hamper 100 %. realisasi kurang dari 90% berjumlah 9 (Sembilan) Kegiatan, dan kegiatan yang capaiannya sama dengan target yaitu sebesar 100 berjumlah 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan "Pengembangan Kompetensi ASN".

No.	Kegiatan	Realisasi (%)			
		2020		2021	
		fisik	keu	fisik	keu
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31,6	31,6
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			93,91	93,91
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			86,92	86,92
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			59,29	59,29
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			56,46	56,46
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,52	92,52
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,92	52,92
8	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			85,20	85,20
9	Mutasi dan Promosi ASN			58,75	58,75

10	Pengembangan Kompetensi ASN			100	100
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			42,28	42,28
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			76,48	76,48

Langkah yang diambil untuk mengantisipasi kegagalan atas realisasi capaian kegiatan pada tahun 2021 agar tidak terulang pada tahun 2022 adalah dengan membuat perencanaan yang baik, yaitu perencanaan dengan mempertimbangkan factor penyebab kegagalan dan kesuksesan pada tahun 2021, perencanaan berbasis data, penyusunan tatakelola kegiatan serta pelaksanaan kegiatan sesuai tatakelola dengan dibatasi bahwa kegiatan harus selesai di bulan November sehingga penyusunan keuangan akhir tahun dan pelaporan kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan 3 (Tiga) program, 12 Kegiatan sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada 4 (empat) antara lain :

- Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan).
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas.

Target kinerja 100%, dan didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.774.461.011,- (*Dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu sebelas ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar **89 %** dengan realisasi anggaran **Rp.**

11.350.002.972,- (*Sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau **88,85 %**. Sehingga capaian kinerja sampai Triwulan IV tahun 2021 masuk dalam kategori **TINGGI**.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

- Pembayaran belanja Jasa tenaga kontrak kerja waktu terbatas dilaksanakan secara rutin dan tepat waktu.
- Kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran yang tetap diefektifkan baik sebelum pelaksanaan WFH (*work from home*) dan selama masa WFH.
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya.
- Adanya teknologi digital dan sistem online yang memungkinkan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dari rumah (WFH).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 Kegiatan, diantaranya :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yaitu persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 55.683.000,- (*lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rp.

35.079.689,- Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator kinerja kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah yaitu persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 9.751.605.404,- (*Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus lima empat ratus empat ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 92,81% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.157.315.141,- (*Sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah*). Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

Tidak ada hambatan yang berarti, karena kegiatan ini berisi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran pengelola keuangan. Rencana tindak lanjut dengan mempercepat serta meneliti dokumen-dokumen pengajuan pencairan.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- c. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

Indikator kinerja kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yaitu indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan), target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 346.825.000,- (*Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 98 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 301.470.933,-. Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan), target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 427.407.800,- (*empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 60% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 253.410.581,- Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori Rendah.

Adapun faktor penghambat sehingga tidak adanya pencairan pada sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ialah dikarenakan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang ada masih bisa digunakan sampai dengan Desember 2021.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Pengadaan aset tak berwujud
- c. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 508.607.500,- (*Lima ratus delapan juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **56 %** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.180.000,- Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Rendah**.

Pada sub kegiatan pengadaan asset tak berwujud terdapat 2 (dua) aplikasi yang direncanakan yaitu aplikasi e-Office dan LPPD berbasis e-kinerja , namun dalam pelaksanaannya yang terlaksana hanya aplikasi e-Office, sedangkan LPPD berbasis e-kinerja belum dilaksanakan dikarenakan adanya aplikasi yang mirip sehingga ditakutkan terjadi tumpang tindih fungsi aplikasi dan apabila tetap dilaksanakan, akan menjadi temuan inspektorat.

Tindak Lanjut yang akan dilakukan kedepannya ialah mengembangkan aplikasi e-kinerja yang sudah diterapkan sebelumnya dalam hal ini menambah variasi atau fitur sehingga aplikasi dapat lebih luas penggunaannya.

Selanjutnya pada sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yaitu Gedung Jasa konsultan perencanaan dimana dalam pelaksanaannya belum direalisasikan dikarenakan terhambat pada waktu pelaksanaan karena dimulai dari persiapan pengadaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pertanggungjawaban dan pencairan yang dalam proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Tindak lanjut pada sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya ialah kegiatan tersebut akan dimasukkan di anggaran pokok tahun 2022.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan), target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.071.144.000,- (*satu milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **100 %** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 991.067.988,- (*Sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*). Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun faktor pendorong adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 613.188.307,- (*enam ratus tiga belas juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **77 %** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 324.478.784,- (*Tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*). Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 65,22% (3.108 Pegawai ASN PTS 11.081 Pegawai SMA).
- Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 4,37%.
- Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan), target 4,37%.

Target kinerja 90% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 2.077.662.500,- (*dua milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV

sebesar **93 %** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.491.048,-. Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

- Kegiatan Pelayanan Kepegawaian (kepangkatan, KGB, Usulan Cuti dan Pensiun) yang tetap diefektifkan baik sebelum pelaksanaan WFH (work from home) dan selama masa WFH.
- Dukungan serta kinerja yang optimal dari pelaksana dan penanggungjawab kegiatan.
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya.
- Adanya teknologi digital dan sistem online yang memungkinkan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dari rumah (WFH).

Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :

- Terhambatnya proses pengisian PDM pada tingkat guru sehingga proses penginputan membutuhkan waktu yang sangat lama karena sering kali diperpanjang

Tindak Lanjut :

- Mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Beradaptasi dengan keadaan, mematuhi himbauan dan aturan pemerintah, serta lebih intens berkoordinasi dengan SKPD mengenai fungsi kepegawaian dan Diklat yang berjalan dan yang tidak berjalan, serta mencari solusi dengan tetap berkoordinasi dengan SKPD yang berkompeten.
- Menyikapi perkembangan bencana non alam Pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan jumlah kasus terpapar COVID-19 yang secara signifikan mengalami peningkatan, maka direkomendasikan untuk melaksanakan kegiatan secara virtual ataupun secara pertemuan langsung dengan tetap mengedepankan protokoler kesehatan yang berlaku dalam pelaksanaannya.

Program kepegawaian daerah terdiri atas 4 (empat) kegiatan, diantaranya:

1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- c. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yaitu indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan Kepegawaian, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.467.498.500,- (*satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.250.281.550,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **84,55 %**, Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

2) Mutasi dan Promosi ASN

- a. Pengelolaan Mutasi ASN
- b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yaitu indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan Kepegawaian, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 141.909.000,- (*Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*). Adapun realisasi anggaran triwulan IV sebesar Rp. 83.373.571,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **88 %**, Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Tinggi**.

3) Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
- b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yaitu indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan Kepegawaian, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 100%

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- c. Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yaitu indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan Kepegawaian, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 418.255.000,- (*empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Adapun realisasi anggaran triwulan IV sebesar Rp. 176.835.927,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar **99 %**, Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 65,22% (3.108 Pegawai ASN PTS 11.081 Pegawai SMA).
- Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 4,37%.
- Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan), target 4,37%.

1) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 7.593.388.000,- (*Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Adapun capaian kinerja sampai Triwulan IV sebesar 96% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.807.419.880,-. Sehingga Capaian kinerja sampai Triwulan IV Tahun 2021 masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (**BKPSDMD**) melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan. Dengan rata-rata capaian kinerja **92,67 %** dengan serapan anggaran **83,39%** dengan kriteria penilaian **TINGGI**.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja SKPD dan pencapaian rencana strategis SKPD tahun 2021 adalah sebagaimana terangkum dalam table 2.1 di bawah ini (Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2021).

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Makassar

NO	KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2021 (%)						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.					
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 * 100%						
											22.445.511.211																	
1	5	03	01			0	0	0	0	100	12.774.460.711	12.774.460.711	87	2.513.188.596	63	3.321.645.579	67.943	1.939.357.072	233	3.827.978.053	16.819	11.350.002.972	100	88,85				
1	5	03	01	2	01					19	55.683.000	55.683.000	7		8	-	5	18.694.450	5	16.385.239	19	35.079.689	100	63,00				
	5	03	01	2	01					3	10.628.000	10.628.000	1		1		1	3.500.000	1	2.736.426	3	6.236.426	100	58,68				
	5	03	01	2	02					1	7.195.000	7.195.000	1		1			2.875.294		2.875.294	1	5.750.588	100	79,92				
	5	03	01	2	03					1	4.195.000	4.195.000	1		1			2.832.150		2.832.150	1	2.832.150	100	67,51				
	5	03	01	2	04					1	7.490.000	7.490.000	1		1			3.482.738		2.550.000	1	6.032.738	100	80,54				
	5	03	01	2	05					1	6.790.000	6.790.000	1		1			2.803.680		2.550.000	1	5.353.680	100	78,85				
	5	03	01	2	06					5	8.490.000	8.490.000	1		1		2		2	2.323.519	5	2.323.519	100	27,37				
	5	03	01	2	07					7	10.895.000	10.895.000	1		2		2	3.200.588	2	3.350.000	7	6.550.588	100	60,12				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	64,71						
Predikat Kinerja																					Tinggi	Sangat Rendah						
2	5	03	01	2	02					100%	0	0	0	0	100	9.751.605.404	9.751.605.404	2.228.159.959	-	2.893.794.165	-	1.482.689.146	93	2.552.671.871	93	9.157.315.141	92,81	93,91
	5	03	01	2	02	01				77	9.413.225.404	9.413.225.404	77	2.175.299.959	2.791.434.165	1.396.206.343	69	2.474.611.871	69	8.837.552.338	89,61	93,88						
	5	03	01	2	02	02				26	243.240.000	243.240.000	26	31.860.000	81.360.000	54.900.000	23	56.910.000	23	225.030.000	88,46	92,51						

5	03	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Jenis Laporan	0	0	0	0	5	95.140.000	95.140.000	21.000.000	21.000.000	31.582.803	5	21.150.000	5	94.732.803	100,00	99,57				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						92,69	95,32					
Predikat Kinerja																						Tinggi	Tinggi					
3	5	03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	90%	0	0	0	0	90	346.825.000	346.825.000	25	-	25	4.304.000	138	138.295.000	127	158.871.933	315	301.470.933	87	86,92	
5	03	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116 Stel	0	0	0	0	116	75.000.000	75.000.000							72.875.000	125	125	72.875.000	107,76	97,17	
5	03	01	2	05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	400 SK	0	0	0	0	400	36.993.000	36.993.000	139	151					33.802.833	427	33.802.833	106,75	91,38		
5	03	01	2	05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12 Orang	0	0	0	0	12	234.832.000	234.832.000		4	4.304.000	1	65.420.000	2	125.069.100	7	194.793.100	82,95	82,95		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						90,50	90,50					
Predikat Kinerja																						Tinggi	Tinggi					
4	5	03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia	90%	0	0	0	0	90	427.407.500	427.407.500	2	41.506.300	8	25.292.900	-	17.335.900	-	169.275.481	75%	253.410.581	60	59,29	
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200 Buah	0	0	0	0	200	7.750.000	7.750.000							-	tdk ada pencairan	-	-	-	0,00	
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bulan	0	0	0	0	12	29.802.000	29.802.000							28.730.841	-	28.730.841	96,41	96,41		
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	0	0	0	0	12	92.925.500	92.925.500							87.658.340	-	87.658.340	94,33	94,33		
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18 Jenis	0	0	0	0	18	54.560.000	54.560.000		3	4.660.000		5.825.000		3.495.000	3	13.980.000	25,62	25,62		
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Bulan	0	0	0	0	12	8.370.000	8.370.000	2		2				-	7.885.000	4	7.885.000	94,21	94,21	
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	28 Kali	0	0	0	0	28	234.000.000	234.000.000		41.506.300	3	20.632.900		11.510.900		41.506.300	3	115.156.400	49,21	49,21	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						59,96	59,96					
Predikat Kinerja																						Rendah	Rendah					
5	5	03	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	90%	0	0	0	0	8	508.607.500	508.607.500	-	-	-	-	-	-	8	287.180.000	45%	287.180.000	56	56,46	
5	03	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	0	0	0	0	8	208.607.500	208.607.500							-	4	192.010.000	4	192.010.000	92,04	92,04
	03	01	2	07	08	Pengadaan aset tak berwujud		2 jenis						200.000.000	200.000.000									95.170.000	1	95.170.000	50	47,59
	03	01	2	07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 unit						100.000.000	100.000.000									tdk terlaksanan				
Rata-rata capaian kinerja (%)																						47,35	46,54					
Predikat Kinerja																						Rendah	Rendah					
6	5	03	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	90%	0	0	0	0	2	1.071.144.000	1.071.144.000	50	234.522.337	3	253.612.894	51.433	237.588.576		517.510.365	2	991.067.844	93	92,52	
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	49 Orang	0	0	0	0	49	984.433.200	984.433.200	48	228.500.736		246.444.672		224.971.968		252.192.676	48	952.110.052	97	96,72	
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	0	0	0	0	12	86.710.800	86.710.800	2	6.021.601	3	7.168.222	3	12.616.608	4	13.151.361	12	38.957.792	45	44,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						70,82	70,82					
Predikat Kinerja																						Tinggi	Tinggi					
7	5	03	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	0	0	0	0	4	613.188.307	613.188.307	3	9.000.000	19	144.641.620	16.367	44.754.000	-	126.083.164	16.389	324.478.784	53	52,92	

5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	500 ASN	0	0	0	0	500	142.577.000	142.577.000					75.000.475	13.745.809	-	88.746.284	62,24	62,24		
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	11.019 ASN dan 4.388	0	0	0	0	11.019	49.034.000	49.034.000	55	61	30			48.949.643	146	48.949.643	99,83	99,83		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						59,78	59,78				
Predikat Kinerja																						Rendah	Rendah				
III	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		69,98%	0	0	0	0	100	7.593.388.000	7.593.388.000	1	0	0	3.268.002.200	526	0	0	2.539.417.680	527	5.807.419.880	76	76,48
1	5	04	02	2	02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	1 Jenis	0	0	0	0	1	7.593.388.000	7.593.388.000	1	-	-	3.268.002.200	526	-	-	2.539.417.680	527	5.807.419.880	76,48	76,48
	5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	96 Orang	0	0	0	0	96	7.593.388.000	7.593.388.000	17	19	3.268.002.200	526			2.539.417.680	562	5.807.419.880	76,48	76,48
Rata-rata capaian kinerja (%)																						76,48	76,48				
Predikat Kinerja																						Rendah	Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						83,39	83,39				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Tinggi	tinggi				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam dokumen-dokumen perencanaan SKPD dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah memiliki tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar indikator kinerja sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja program, dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah seperti dalam table 2.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, indikator kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 "Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara" terpenuhi dari target yang telah ditetapkan yaitu target 69,20 % tercapai 70, 48 %, sehingga hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2020 dengan kategori berhasil memenuhi target kinerjanya. Dengan demikian indikator sasaran indeks kualitas Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kredibilitas terus akan dilakukan agar lebih mampu dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada pegawai Kota Makassar.

2.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan professional berdasarkan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Persentase Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional untuk Peningkatan pengetahuan. Sasaran kedua yaitu

Terwujudnya Pengembangan ASN sesuai Kompetensi dengan indikator sasaran "Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan". Adapun pencapaian kinerja pelayanan BKPSDMD sebagaimana table berikut.

Table 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65,00	65,10	65,21	64,92	65,10	75,56	8,00	8,12
2.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,24	7,24	7,24	7,64	7,26	7,24	7,46	7,55
3.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,24	7,24	7,24	7,24	7,25	7,24	7,46	7,55
4.	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	0 JP	20 JP	20 JP	20 JP
5.	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2,12	2,22	2,86	3,55	0	2,12	2,24	2,55
6.	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	91	91	94	97	0	91	92	94

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi, telaah RTRW dan KLHS, maka dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yaitu :

1. Belum terpenuhinya kompetensi PNS dan belum terpenuhinya jumlah PNS tenaga teknis strategis akibat terbatasnya formasi dibandingkan beban kerja maupun rasio jumlah pensiun;
2. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai;
3. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan;
4. Belum optimalnya Layanan dan Administrasi Perkantoran, serta perlu dilakukan optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BKPSDMD, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam sector pemerintahan.
5. Tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemic Global *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di akhir Tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur TIK yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, antar Kementerian/Lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2021 adalah masalah eksternal karena sebagian besar *outcomes* akhir produk kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ada pada pihak ketiga, diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (pusat dan regional), Kementerian PAN dan RB, dan Sekretaris Negara. Permasalahan dan hambatan lain adalah masalah internal yang berupa nilai individu, kultur individu, responsibilitas individu terhadap masalah, hubungan antar pribadi dengan unit pemangku kepentingan dan/atau antar pemangku kepentingan.

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan kualifikasi **sangat baik** yang ditunjukkan oleh pencapaian *output*, *outcome* dan capaian indikator kinerja utama SKPD.

Pesatnya perkembangan sistem Informasi menuntut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar untuk terus mengembangkan sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik.

Sesuai sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu Kualitas Aparatur Sipil Negara Meningkat, maka prioritas program tahun 2021-2026, adalah "**Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara**". Program dan kegiatan yang mendukung akselerasi terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam tataran implementasi ASN berkompentensi di Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang lain harus mendukung secara totalitas program prioritas ini.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Makassar Tahun 2022 adalah "**Percepatan mewujudkan makassar kota dunia Yang sombere dan smart city dengan imunitasKuat untuk semua**".

Sekaitan dengan Visi tersebut, ditetapkan tiga misi sebagai rujukan pencapaian Visi dimaksud, yang nantinya dikolaborasi oleh OPD. Tiga misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Revolusi SDM dan Percepatan reformasi birokrasi menuju Kota yang unggul dengan pelayanan public kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelasd unia yang somber dan smart city untuk semua.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, seta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan BKPSDMD termasuk pada misi ke-1 Kota Makassar yaitu Revolusi SDM dan Percepatan reformasi birokrasi menuju Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi, maka dirumuskan beberapa langkah untuk mencapai Misi tersebut.

Adapun rumusan Misi tersebut sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan manajemen kepegawaian dan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan profesional;
- 2) Penyajian data kepegawaian yang apresiatif;
- 3) Peningkatan koordinasi aktif dibidang kepegawaian dengan SKPD sebagai mitra strategis;
- 4) Mendukung kreatifitas dan kepastian karier aparatur;

- 5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara komprehensif;
- 6) Mengimplementasikan setiap kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- 7) Mendorong terwujudnya Aparatur Professional dan berwawasan global;
- 8) Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD dalam pengembangan aparatur;
- 9) Mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Makassar

Tabel T-C 31

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
NO.	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah											
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100	32.800.270.858	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	19	402.429.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	19	402.429.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	34.006.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	34.006.000	

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makasar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	19.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makasar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	19.880.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makasar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1	19.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makasar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun		19.700.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makasar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	17.435.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makasar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun		17.435.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	16.280.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makasar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		16.280.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makasar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	5	275.683.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makasar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		275.683.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	7	19.445.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun		19.445.000	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	14	10.251.390.478	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	14	10.251.390.478	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makasar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75	9.801.636.478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makasar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	75	9.801.636.478	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makasar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	298.680.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makasar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	298.680.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makasar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	151.074.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makasar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	151.074.000	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	3	416.297.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	3	416.297.200	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makasar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	116	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makasar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	116	75.000.000	
2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Makasar	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	400	73.926.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Makasar	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	400	73.926.000	
3	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Makasar	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2	267.371.200	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Makasar	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2	267.371.200	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	6	901.879.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makasar	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	6	901.879.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makasar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200	7.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makasar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200	7.750.000	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makasar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	64.974.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makasar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	64.974.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makasar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	93.220.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Makasar	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12	93.220.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makasar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	54.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makasar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	54.560.000	
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makasar	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	19.375.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makasar	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	19.375.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makasar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	28	662.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makasar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	28	662.000.000	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makasar	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	8	18.914.781.380	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makasar	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	8	18.914.781.380	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makasar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1	700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makasar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1	700.000.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makasar	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	1.162.140.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makasar	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	1.162.140.750	

3	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makasar	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunanlainnya	1	17.052.640.630	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Makasar	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunanlainnya	1	17.052.640.630
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makasar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	2	1.205.446.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makasar	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	2	1.205.446.800
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makasar	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	49	1.015.246.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makasar	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	49	1.015.246.800
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makasar	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	190.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makasar	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	190.200.000
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makasar	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4	708.047.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makasar	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4	708.047.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makasar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas Jabatan	1	40.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makasar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas Jabatan	1	40.630.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makasar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	70	249.482.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makasar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	70	249.482.000

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makasar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	147.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makasar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	147.200.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makasar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	270.735.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makasar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	270.735.000
B.	PROGRAM KEPEGAWAIN DAERAH	Makasar	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	3.216.914.000	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Makasar	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	3.216.914.000
VIII	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Makasar	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	4	1.745.234.500	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Makasar	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	4	1.745.234.500
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Makasar	Jumlah pengadaanASN	778	687.797.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Makasar	Jumlah pengadaanASN	778	687.797.000

2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Makasar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	500	242.682.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Makasar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	500	242.682.000	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makasar	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	6	525.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makasar	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	6	525.000.000	
4.	Pengelolaan Data Kepegawaian		Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	100	209.486.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	100	209.486.000	
5.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Rekonsiliasi Data Verifikasi Kepegawaian	90	80.269.500	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Rekonsiliasi Data Verifikasi Kepegawaian	90	80.269.500	
IX	Mutasi dan Promosi ASN	Makasar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	5225	213.743.000	Mutasi dan Promosi ASN	Makasar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	5225	213.743.000	
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Makasar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	1250	112.231.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Makasar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	1250	112.231.000	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Makasar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3975	101.512.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Makasar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3975	101.512.000	

X	Pengembangan Kompetensi ASN	Makasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola	2	619.316.000	Pengembangan Kompetensi ASN	Makasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola	2	619.316.000	
1	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Makasar	Jumlah Adiministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	1	32.658.000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Makasar	Jumlah Adiministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	1	32.658.000	
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Makasar	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	4	440.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Makasar	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	4	440.000.000	
4.	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Makasar	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	1	146.658.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Makasar	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	1	146.658.000	
XI	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola	3	638.620.500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola	3	638.620.500	
1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah pegawai yang di evaluasi kinerjanya dan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	11019	479.923.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah pegawai yang di evaluasi kinerjanya dan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	11019	479.923.000	
2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	500	109.284.500	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	500	109.284.500	
3.	Pembinaan Disiplin ASN	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	11019	49.413.000	Pembinaan Disiplin ASN	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	11019	49.413.000	

C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Makassar	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100	7.572.474.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Makassar	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100	7.572.474.000
			persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
			persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural					persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		
XII	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Makassar	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	1	7.572.474.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Makassar	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	1	7.572.474.000
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	773	6.067.284.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Makassar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	773	6.067.284.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang		Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai jenjang jabatannya.	4	1.505.190.000,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang		Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai jenjang jabatannya.	4	1.505.190.000,00

2	Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Makassar				Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Makassar				
				total	43.589.658.858				total	43.589.658.858	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Sampai dengan tahun ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar belum melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas ini berhubungan dengan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, BKPSDM mempunyai kewajiban mendukung kebijakan kepala daerah sesuai tugasnya :

1. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi untuk operasional Dana Kelurahan, dikarenakan SDM Aparatur Sipil Negara di wilayah kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda terdepan pelayanan langsung kepada masyarakat sangat penting.
2. *Talent pool* untuk kader potensial sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pengembangan karir dan penataan ASN.
3. *Roadmap* karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran pengembangan karir ASN.
4. Penilaian Kompetensi melalui metode *Assesment centre* untuk mendapatkan informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan karir ASN.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan

prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk :

1. Menyediakan statistic keuangan Pemerintah Daerah.
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah.
4. Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 Jam Pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Makassar telah menyusun RKPD Tahun 2022 sesuai Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Dari hasil mapping, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar memiliki 2 (dua) urusan yaitu Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi ASN pada Pemerintah Kota Makassar.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sesuai Rencana Strategis yang ditetapkan yaitu **"Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara"** dimana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan.

Indikator tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu **"Indeks kualitas Aparatur Sipil Negara"**, dimana formula / rumus untuk mengukur indikator tujuan tersebut adalah 50% persentase pemenuhan penataan ASN + 20% persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan + 30% persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan pengetahuan.

Sasaran strategis rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan profesional berdasarkan tugas dan fungsinya. Dan terwujudnya pengembangan ASN sesuai kompetensi. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran strategis sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu "Persentase jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan pengetahuan" dan "persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan", dimana formula

/ rumus untuk mengukur indikator tujuan tersebut adalah 50% persentase pemenuhan penataan ASN + 20% persentase ASN yang memenuhi kompetensi. Adapun target sasaran tahun 2022 yaitu Indeks kualitas Aparatur Sipil Negara sebesar 75,7 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mendukung pencapaian misi pertama Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dukungan terhadap *good and clean governance* diwujudkan dalam penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah satunya melalui penerapan *sistem merit* sesuai Undang-undang ASN, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya.

"*Merit System*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ASN dilakukan melalui tahapan :

1. Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif;
2. Menerapkan prinsip *fairness*;
3. Penggajian, *reward and punishment* berbasis kinerja ;
4. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik;
5. Manajemen SDM secara efektif dan efisien;
6. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.

Selain penerapan *system merit*, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dibutuhkan pengembangan SDM sebagai motor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM pegawai. SDM pegawai SDM aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya. Untuk itu, sumber daya aparatur perlu dikelola melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM aparatur. Terkait definisi pendidikan dan pelatihan, Hasibuan (2005_) mengartikan pendidikan sebagai proses awal berkembangnya manusia, sedangkan pelatihan merupakan kelanjutan atau pembenahan kecakapan, ketangkasan serta kemampuan guna melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pencermatan antara BKPSDMD dan Bappeda Tahun

2021, rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar tahun 2022 sesuai hasil analisa program dan kebutuhan anggaran khususnya Belanja Operasi membutuhkan anggaran sebesar Rp. 26.401.000.000,- (*dua puluh enam milyar empat ratus satu juta rupiah*). Adapun program dan kegiatan dalam rencana kerja BKPSDMD tahun 2022 selain sesuai nomenklatur dan kodifikasi pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 juga disesuaikan dengan proses bisnis BKPSDMD yang berdasarkan atas Undang-undang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Rencana kerja BKPSDMD Tahun 2022 terdiri atas 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 202357

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)/kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		43.589.658.858	
5	5.03				KEPEGAWAIAN		36.017.184.858	
5	5.03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		32.800.270.858	PAD
5	5.03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	402.429.000	PAD
5	5.03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	34.006.000	PAD
5	5.03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	19.880.000	PAD
5	5.03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	19.700.000	PAD
5	5.03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	17.435.000	PAD
5	5.03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	16.280.000	PAD
5	5.03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	275.683.000	PAD
5	5.03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	19.445.000	PAD
5	5.03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	10.251.390.478	PAD
5	5.03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	9.801.636.478	PAD
5	5.03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.680.000	PAD
5	5.03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.074.000	PAD

5	5.03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	416.297.200	PAD
5	5.03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	75.000.000	PAD
5	5.03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	73.926.000	PAD
5	5.03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	267.371.200	PAD
5	5.03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	901.879.000	PAD
5	5.03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.750.000	PAD
5	5.03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	64.974.000	PAD
5	5.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	93.220.000	PAD
5	5.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.560.000	PAD
5	5.03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	19.375.000	PAD
5	5.03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	662.000.000	PAD
5	5.03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	18.914.781.380	PAD
5	5.03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	700.000.000	PAD
5	5.03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.162.140.750	PAD
5	5.03	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	17.052.640.630	PAD
5	5.03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	1.205.446.800	PAD
5	5.03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1.015.246.800	PAD
5	5.03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	190.200.000	PAD
5	5.03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	708.047.000	PAD
5	5.03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	40.630.000	PAD
5	5.03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	249.482.000	PAD
5	5.03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.200.000	PAD
5	5.03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.735.000	PAD

5	5.03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.216.914.000	PAD
						Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
						Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
5	5.03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	1.745.234.500	PAD
5	5.03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pengadaan ASN	687.797.000	PAD
5	5.03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	242.682.000	PAD
5	5.03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	525.000.000	PAD
5	5.03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	209.486.000	
5	5.03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Rekonsiliasi Data Verifikasi Kepegawaian	80.269.500	PAD
5	5.03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan promosi ASN	213.743.000	PAD
5	5.03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi dan promosi ASN	112.231.000	PAD
5	5.03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	101.512.000	PAD
5	5.03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola	619.316.000	PAD
5	5.03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	32.658.000	PAD
5	5.03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	440.000.000	PAD
5	5.03	2	2.04	7	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	146.658.000	PAD
5	5.03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola	638.620.500	PAD
5	5.03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang di evaluasi kinerjanya dan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	479.923.000	PAD
5	5.03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	109.284.500	PAD
5	5.03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	49.413.000	PAD

5	5.04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7.572.474.000	
5	5.04	02	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	7.572.474.000	PAD
						persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
						persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		
5	5.04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	7.572.474.000	PAD
5	5.04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	6.067.284.000	PAD
5	5.04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai jenjang jabatannya.	1.505.190.000,00	
							43.589.658.858	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan serta pendanaan atau anggaran indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

BAB IV RENJA PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Makassar
Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Bidang Pemerintahan dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Urusan dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
				Lokasi	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				43.589.658.858				
5.5.03			KEPEGAWAIAN				36.017.184.858				
5.5.03.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Ujung Pandang	100	%	32.800.270.858	PAD	100	%	15.849.401.700
5.5.03.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Ujung Pandang	19	Dokumen	402.429.000	PAD	19	Dokumen	81.051.300
5.5.03.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Ujung Pandang	3	Dokumen	34.006.000	PAD	3	Dokumen	31.490.800

55.03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Kec. Ujung Pandang	1	Dokumen	19.880.000	PAD	1	Dokumen	7.914.500
55.03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	Kec. Ujung Pandang	1	Dokumen	19.700.000	PAD	1	Dokumen	4.614.500
55.03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Kec. Ujung Pandang	1	Dokumen	17.435.000	PAD	1	Dokumen	8.239.000
55.03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	Kec. Ujung Pandang	1	Dokumen	16.280.000	PAD	1	Dokumen	7.469.000
55.03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kec. Ujung Pandang	5	Dokumen	275.683.000	PAD	5	Dokumen	9.339.000
55.03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kec. Ujung Pandang	7	Dokumen	19.445.000	PAD	7	Dokumen	11.984.500
55.03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Kec. Ujung Pandang	14	Dokumen	10.251.390.478	PAD	14	Dokumen	13.035.154.000
55.03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ujung Pandang	75	Orang	9.801.636.478	PAD	75	Orang	12.650.000.000

5	5.03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Ujung Pandang	18	Orang	298.680.000	PAD	18	Orang	280.500.000
5	5.03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Ujung Pandang	7	Orang	151.074.000	PAD	7	Orang	104.654.000
5	5.03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	Kec. Ujung Pandang	3	Jenis	416.297.200	PAD	3	Jenis	181.307.500
5	5.03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perengkapannya	Kec. Ujung Pandang	116	Stel	75.000.000	PAD	116	Stel	82.500.000
5	5.03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	Kec. Ujung Pandang	400	SK	73.926.000	PAD	400	SK	40.692.300
5	5.03	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kec. Ujung Pandang	2	Orang	267.371.200	PAD	2	Orang	58.115.200
5	5.03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	Kec. Ujung Pandang	6	Jenis	901.879.000	PAD	6	Jenis	514.148.580
5	5.03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ujung Pandang	200	Buah	7.750.000	PAD	200	Buah	8.525.000

55.03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	64.974.000	PAD	12	Bulan	32.782.530
55.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	93.220.000	PAD	12	Bulan	102.218.050
55.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Ujung Pandang	18	Buah	54.560.000	PAD	18	Buah	60.016.000
55.03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	19.375.000	PAD	12	Bulan	9.207.000
55.03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kec. Ujung Pandang	28	Kali	662.000.000	PAD	28	Kali	301.400.000
55.03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Kec. Ujung Pandang	8	Unit	18.914.781.380	PAD	8	Unit	119.468.250
55.03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparaturnya dalam kondisi baik	Kec. Ujung Pandang	1	Unit	700.000.000	PAD			
55.03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ujung Pandang	8	Unit	1.162.140.750	PAD	8	Unit	119.468.250
55.03	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec. Ujung Pandang	1	Unit	17.052.640.630	PAD			

5	5.03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	Kec. Ujung Pandang	2	Jenis	1.205.446.800	PAD	2	Jenis	1.168.358.400	
55	5.03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kec. Ujung Pandang	49	Orang	1.015.246.800	PAD	49	Orang	1.072.976.520
55	5.03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	190.200.000	PAD	12	Bulan	95.381.880
5	5.03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kec. Ujung Pandang	4	Jenis	708.047.000	PAD	4	Jenis	749.913.670	
55	5.03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Ujung Pandang	1	Unit	40.630.000	PAD	1	Unit	30.754.680
55	5.03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Ujung Pandang	70	Unit	249.482.000	PAD	70	Unit	340.830.490
55	5.03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	147.200.000	PAD	12	Bulan	122.320.000

5	5.03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Ujung Pandang	12	Bulan	270.735.000	PAD	12	Bulan	256.008.500
5	5.03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Kec. Ujung Pandang	100	%	3.216.914.000	PAD	100	%	3.901.736.575
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
				Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)										
5	5.03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	4	Jenis	1.745.234.500	PAD	4	Jenis	3.016.605.075
5	5.03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah pengadaan ASN	Kec. Ujung Pandang	778	Orang	687.797.000	PAD	778	Orang	1.625.868.750
5	5.03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Kec. Ujung Pandang	500	Orang	242.682.000	PAD	500	Orang	827.157.375

55.03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	6	Aplikasi	525.000.000	PAD	6	Aplikasi	550.000.000
55.03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Kec. Ujung Pandang	100	%	209.486.000				
55.03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Rekonsiliasi Data Verifikasi Kepegawaian	Kec. Ujung Pandang	90	%	80.269.500	PAD	90	%	13.578.950
55.03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah mutasi dan promosi ASN	Kec. Ujung Pandang	5225	ASN	213.743.000	PAD	5225	ASN	167.453.000
55.03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah mutasi dan promosi ASN	Kec. Ujung Pandang	1250	ASN	112.231.000	PAD	1250	ASN	67.298.000
55.03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kec. Ujung Pandang	3975	Orang	101.512.000	PAD	3975	Orang	100.155.000
55.03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	2	Jenis	619.316.000	PAD	2	Jenis	257.598.000
55.03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Adiministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	1	Jenis	32.658.000	PAD	1	Jenis	14.850.000
55.03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	4	Orang	440.000.000	PAD	4	Orang	242.748.000

5	5.03	2	2.04	7	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	1	Jenis	146.658.000	PAD			
5	5.03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	3	Jenis	638.620.500	PAD	3	Jenis	460.080.500
5	5.03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang di evaluasi kinerjanya dan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	Kec. Ujung Pandang	11019	ASN	479.923.000	PAD	11019	ASN	249.308.400
5	5.03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	Kec. Ujung Pandang	500	ASN	109.284.500	PAD	500	ASN	156.834.700
5	5.03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	Kec. Ujung Pandang	11019	ASN	49.413.000	PAD	11019	ASN	53.937.400
5	5.04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					7.572.474.000				
z														
5	5.04	02	2.01		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kec. Ujung Pandang	100	%	7.572.474.000	PAD	100	%	7.153.402.300

							persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural								
5	5.04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	Kec. Ujung Pandang	1	Jenis	7.572.474.000	PAD	1	Jenis	7.153.402.300
5	5.04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan bagi		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kec. Ujung Pandang	773	Orang	6.067.284.000	PAD	25	Orang	7.153.402.300

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Strategis 2021-2026 BKPSDMD Kota Makassar yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 merupakan penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2022 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, September 2021
KEPALA BADAN,



Drs. ANDI SISWANTA

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip : 19621206 199003 1 007

